



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT: DAMPAK TERHADAP SEKTOR
AGRIKULTUR INDONESIA

Skripsi

Oleh

Maria Veronika Citra Dewi

2013330169

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT: DAMPAK TERHADAP SEKTOR
AGRIKULTUR INDONESIA

Skripsi

Oleh

Maria Veronika Citra Dewi

2013330169

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., MA.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Maria Veronika Citra Dewi
Nomor Pokok : 2013330169
Judul : Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (I-J EPA):
Dampak terhadap Sektor Agrikultur Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 10 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sapta Dwikardana, Ph. D.

: 

Sekretaris

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., MA

: 

Anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Veronika Citra Dewi

NPM : 2013330169

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: Dampak terhadap Sektor Agrikultur Indonesia*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Desember 2016



Maria Veronika Citra Dewi

ABSTRAK

Nama : Maria Veronika Citra Dewi
NPM : 2013330169
**Judul : Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (I-J EPA):
Dampak terhadap Sektor Agrikultur Indonesia**

Penelitian ini menggambarkan tentang dampak implementasi I-J EPA sebagai sebuah bentuk kerjasama ekonomi bilateral terhadap sektor agrikultur Indonesia. Implementasi yang dibahas akan berfokus pada kerjasama antara Indonesia dengan Jepang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di sektor agrikultur Indonesia, penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang akan berdampak pada ekspor dan impor komoditas agrikultur, serta investasi di sektor agrikultur dalam kerangka I-J EPA pada tahun 2008-2013. Deskripsi ini akan menjawab pertanyaan riset peneliti, yaitu “*Bagaimana dampak implementasi I-J EPA terhadap sektor agrikultur Indonesia tahun 2008-2013?*”

Untuk menjawab pertanyaan riset tersebut, penulis menggunakan teori dan beberapa konsep, yaitu, teori kerjasama, teori perjanjian kerjasama ekonomi bilateral, konsep negara, konsep kepentingan nasional, konsep ekspor dan impor, konsep investasi. Selanjutnya, penulis menggunakan metode penelitian studi kualitatif di dalam analisis ini.

Deksripsi dalam penelitian menghasilkan beberapa penemuan. Pertama, kerjasama di sektor agrikultur Indonesia yang terjalin di bawah kerangka I-J EPA telah berhasil dilaksanakan sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan daya saing sektor agrikultur, serta ketahanan pangan di Indonesia. Kedua, implementasi I-J EPA dalam menghapus hambatan perdagangan di sektor agrikultur yang dilihat melalui perkembangan nilai ekspor dan impor komoditas agrikultur Indonesia ke Jepang menunjukkan adanya peningkatan nilai ekspor dan impor pasca-implementasi I-J EPA. Ketiga, dari sisi investasi yang dikedepankan dalam implementasi I-J EPA ini belum terlihat memberikan hasil yang signifikan bagi perkembangan investasi dari Jepang di sektor agrikultur Indonesia.

Kata kunci : kerjasama, daya saing, ketahanan pangan, investasi, I-J EPA, perjanjian kerjasama ekonomi bilateral, ekspor, impor

ABSTRACT

Name : Maria Veronika Citra Dewi
NPM : 2013330169
**Title : Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (I-J EPA):
The Results towards Indonesia’s Agricultural Sector**

This research illustrates the results of the implementation of I-J EPA, as a form of bilateral economic cooperation which covers the agricultural sector in Indonesia. Implementation discussed will focus on the cooperation between Indonesia and Japan to improve the quality and competitiveness of the agricultural sector in Indonesia, the elimination of trade barriers that will affect exports and imports of agricultural products, as well as the investments in the agricultural sector within the framework of I-J EPA in 2008-2013. This description will answer the research question, "How the impact of the implementation of I-J EPA to the agricultural sector of Indonesia in 2008-2013?"

In order to answer the research question, researcher uses theories and concepts, namely, theory of cooperation, theory of bilateral economic cooperation agreement, the concept of state, the concept of national interest, the concept of export and import, and the concept of investment. The writing of this research will implements the method of qualitative research.

In conclusion, this research resulted in three points. First, three cooperation in the agricultural sector of Indonesia that had been conducted under I-J EPA resulted in the improvement of quality and competitiveness of agricultural sector, along with the improvement of food security in Indonesia. Second, I-J EPA implementation in the elimination of trade barriers in the agricultural sector of Indonesia resulted in the increase of export and import value of agricultural products from Indonesia to Japan after the implementation of I-J EPA. Third, in terms of investment, the implementation of I-J EPA did not indicate significant result to the development of foreign investment from Japan to agricultural sector in Indonesia.

**Keywords : cooperation, competitiveness, food security, investment, I-J EPA,
bilateral economic cooperation agreement, export, import**

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan seluruh kemampuan penulis. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar akademik Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Secara garis besar, penulisan skripsi ini berisi tentang dampak dari implementasi Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (I-J EPA) terhadap sektor agrikultur Indonesia pada tahun 2008 hingga 2013. Pembahasan ini akan dikaji dari tiga indikator, yaitu kerjasama Indonesia dengan Jepang di sektor agrikultur Indonesia, perkembangan nilai ekspor dan impor komoditas agrikultur Indonesia dari dan/atau ke Jepang, serta perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi Jepang di sektor agrikultur Indonesia.

Penulis berharap agar hasil penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca berkaitan dengan perjanjian kerjasama dan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Di samping itu, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Masih ada kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi penulis dalam hal waktu, tenaga, kemampuan, dan pengetahuan. Maka dari itu, penulis terbuka akan saran maupun kritik yang membangun yang diberikan oleh

para pembaca untuk kemajuan penulis dan kebaikan kerjasama Indonesia – Jepang di masa depan.

Akhir kata, penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pengarahan dan bimbingan, doa maupun dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan penghormatan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Aknolt Kristian Pakpahan selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya serta dengan sabar memberikan masukan-masukan dan petunjuk yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua dukungan dan nasihatnya yang membangun dan menenangkan penulis ketika akan menghadapi sidang skripsi.
2. Orangtua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dalam bentuk dana, kata-kata semangat, dan doa bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat penulis (Mondo, Ardine, Modi, dan Gia) yang telah menemani penulis, memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, 19 Desember 2016

Maria Veronika Citra Dewi

Daftar Isi

Pernyataan	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Kata Pengantar	iv-v
Daftar Isi	vi-vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	viii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1-3
1.2 Identifikasi Masalah.....	3-7
1.2.1 Pembatasan Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Pemikiran	
1.4.1 Kajian Teoretis	8-17
1.4.2 Kajian Literatur.....	17-20
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	20-21
1.6 Sistematika Penulisan	21-23

Bab II Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (I-J EPA).. 24-25

2.1 Proses Pembentukan I-J EPA.....	26-28
2.2 Tujuan I-J EPA	29-32
2.3 Sektor yang Tercakup dalam I-J EPA.....	33-38

2.4 Harapan Indonesia Berkaitan dengan Sektor Agrikultur di Bawah I-J EPA.....	38-40
2.5 Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Menghadapi I-J EPA.....	40-42
Bab III Sektor Agrikultur Indonesia	43-44
3.1 Pengertian Sektor Agrikultur di Indonesia.....	44-47
3.2 Pengertian Sektor Agrikultur di dalam I-J EPA.....	47-49
3.3 Profil Umum Sektor Agrikultur di Indonesia	50-56
3.4 Permasalahan Sektor Agrikultur di Indonesia	56-59
3.5 Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Sektor Agrikultur di Indonesia	59-63
Bab IV Dampak Implementasi I-J EPA terhadap Permasalahan di Sektor Agrikultur Indonesia	64-65
4.1 Kerjasama Indonesia-Jepang di Sektor Agrikultur Indonesia Sebelum Implementasi I-J EPA	65-71
4.2 Implementasi I-J EPA di Sektor Agrikultur di Indonesia.....	71-74
4.3 Dampak Implementasi I-J EPA terhadap Permasalahan di Sektor Agrikultur Indonesia	74-78
4.3.1 Kerjasama di Sektor Agrikultur Indonesia	78-84
4.3.2 Ekspor dan Impor Komoditas Agrikultur Indonesia-Jepang	84-92
4.3.3 Investasi Jepang di Sektor Agrikultur Indonesia.....	92-95
Bab V Kesimpulan	96-100
Daftar Pustaka.....	101-111
Daftar Lampiran	112-113

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Volume Ekspor Komoditas Unggulan Sektor Agrikultur Indonesia ke Jepang tahun 2000-2007.....	54-55
Tabel 3.2	Pangsa Pasar Ekspor Komoditas Agrikultur Indonesia berdasarkan Negara Tujuan Ekspor.....	55
Tabel 4.1	Daftar Kerjasama Indonesia-Jepang di bawah JBIC dan JICA.....	67-69
Tabel 4.2	Nilai Ekspor dan Impor Komoditas Agrikultur Indonesia ke Jepang Tahun 2003-2007 (Juta US\$)	87
Tabel 4.3	Nilai Ekspor dan Impor Komoditas Agrikultur Indonesia ke Jepang Tahun 2008-2012 (Juta US\$)	88
Tabel 4.4	Perkembangan Proyek dan Nilai Investasi Jepang di Sektor Agrikultur Indonesia Tahun 2003-2013.....	92-93

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Jamaludin	111-112
-------------	--	---------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu pilar penting bagi jalannya aktivitas sebuah negara. Ekonomi yang kuat menjadi dasar bagi sebuah negara untuk meningkatkan kapasitas militer dan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintahan sebuah negara dapat memperoleh legitimasi. Untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan kepentingan nasional, negara perlu menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain, di samping memperhatikan ekonomi domestiknya.

Salah satu faktor yang dapat mendorong sebuah negara untuk meningkatkan kekuatannya, yaitu melalui kerjasama atau kerjasama di bidang ekonomi dengan negara lain, baik secara bilateral, regional, multilateral, maupun global. Hubungan bilateral antara dua negara itu sendiri merupakan kerjasama dan ikatan antara dua negara yang dapat terjadi di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan sejarah.¹

Kerjasama ekonomi antara dua negara dapat menguntungkan kedua belah pihak, terutama dalam hal ekspor impor. Ekspor dan impor dapat menguntungkan apabila negara dapat melakukan impor barang atau jasa yang dibutuhkan dan sebaliknya, negara dapat melakukan ekspor kepada

¹ Stein-Erik Krusse dan Zozan Kaya, *Baseline Study on Bilateral Relations*, Nordic Consulting Group, Februari 2013, hal. 2

negara lain barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Kerjasama ekonomi dalam hal ini juga perlu memperhatikan faktor keunggulan masing-masing negara.

Indonesia juga menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, salah satunya dengan Jepang dalam kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (I-J EPA)*.

Setelah melakukan serangkaian perundingan dan negosiasi sejak tahun 2005, pada tahun 2007, Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka I-J EPA yang mulai berlaku pada tahun 2008.² Tidak hanya dengan Indonesia, kerjasama *economic partnership agreement (EPA)* ini juga dilakukan Jepang dengan empat belas negara lainnya, termasuk di antaranya Vietnam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

I-J EPA sendiri merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk membebaskan pasar dengan cara menurunkan tarif bea masuk produk barang dan/atau jasa di antara kedua negara.

Indonesia berharap agar melalui I-J EPA ikatan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang dalam hal pembangunan dan perkembangan Indonesia dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam kerjasama ekonomi antara kedua negara tercakup berbagai sektor, salah satunya adalah sektor agrikultur. Menurut *Oxford dictionaries*, agrikultur merupakan ilmu atau

² Asia's Regional Integration Center, *Trade and Investment: Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*, Asian Development Bank, diakses melalui <https://aric.adb.org/fta/japan-indonesia-economic-partnership-agreement>, pada 1 Maret 2016

praktik bertani, termasuk memelihara tanah untuk ditanami, memelihara hewan untuk menghasilkan makanan, benang wol, maupun produk lainnya.³

Sebagai negara berkembang, Indonesia memanfaatkan sektor agrikultur sebagai faktor yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini berangkat dari kondisi di mana banyak masyarakat negara-negara berkembang yang bekerja pada sektor agrikultur sehingga majunya sektor agrikultur akan berdampak pada majunya perekonomian negara berkembang dan penurunan tingkat kemiskinan.

Kerjasama ini dapat membuka peluang Indonesia di sektor agrikulturnya, seperti perluasan pasar, perluasan lapangan kerja, dan alih teknologi untuk memperbaiki sektor agrikultur Indonesia. Dengan demikian, penulis akan meneliti tentang dampak implementasi I-J EPA terhadap sektor agrikultur Indonesia pada tahun 2008-2013.

1.2 Identifikasi Masalah

Hubungan Indonesia dengan Jepang sendiri telah terjalin sejak tahun 1958 pada saat dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara⁴ dan mulai meningkat pada era Soeharto.⁵ Pada masa ini Jepang merupakan negara pemberi bantuan terbesar bagi Indonesia sehingga Jepang memberi

³ Oxford Dictionary, *Agriculture*, diakses melalui <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/agriculture>, pada 1 Maret 2016

⁴ Japan's Embassy in Indonesia, *Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang*, diakses melalui http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, pada 1 Maret 2016

⁵ Jusuf Wanandi, "Japan-Indonesia Relations: A 50 Years Journey", *The Jakarta Post*, 24 Maret 2008, diakses melalui <http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/23/japanindonesia-relations-a-50-year-journey.html>, pada 6 September 2016

kontribusi paling besar dalam hal pembangunan dan kemajuan Indonesia pada masa itu.

Setelah masa Soeharto pun, Indonesia masih mempertahankan hubungan ekonomi yang baik dengan Jepang. Dalam hal investasi, Jepang juga merupakan investor terbesar bagi Indonesia.⁶ Demikian pula halnya dengan perdagangan, Jepang merupakan rekan perdagangan nomor satu bagi Indonesia, nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai US\$ 17,1 M pada 2007.⁷

Dalam hal sektor agrikultur, keberadaan I-J EPA diharap Indonesia agar Jepang sebagai negara industri maju dengan kualitas sumber daya dan teknologi yang canggih dapat memberikan bantuan bagi Indonesia berupa teknologi, pengembangan kapasitas (*capacity-building*), maupun bantuan teknis.⁸ Bantuan ini diharapkan dapat memajukan sektor agrikultur di Indonesia dalam dua hal:

Pertama, guna meningkatkan daya saing komoditas agrikultur Indonesia di pasar internasional. Daya saing komoditas agrikultur Indonesia ini terkait dengan kualitas komoditas agrikultur yang diekspor oleh Indonesia, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, dan

⁶ Joint Study Group Japan's Ministry of Foreign Affairs, "*Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement Joint Study Group Report*", Mei 2005, hal. 4, diakses melalui <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf>, pada 6 September 2016

⁷ Akbar Nikmatullah Dachlan, "Reviewing IJIPA: an Advantage or Disadvantage for Indonesia?", *The Indonesian Update*, vol. IX/03, Januari 2015, hal. 7, diakses melalui <http://theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2015/02/The-Indonesian-Update-Volume-IX-No-03-January-2015-English.pdf>, pada 6 September 2016

⁸ Akbar Nikmatullah Dachlan, *ibid.*, hal. 8

penguasaan teknologi di bidang agrikultur.⁹ Selama ini, hubungan kerjasama ekonomi yang baik dengan Jepang di sektor agrikultur masih terkendala oleh rendahnya kualitas komoditas agrikultur Indonesia.¹⁰ Rendahnya kualitas komoditas agrikultur Indonesia ini membuat sulitnya komoditas agrikultur Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara-negara maju, salah satunya Jepang.

Dalam kerangka I-J EPA diharapkan ada kerjasama sehingga kualitas komoditas agrikultur Indonesia dapat meningkat. Peningkatan kualitas ini akan membawa Indonesia untuk dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih luas. Dengan demikian komoditas agrikultur yang masuk ke Jepang akan lebih variatif.

Selain itu, di dalam perdagangan komoditas agrikultur antara Indonesia dengan Jepang terdapat tarif bea masuk yang cukup mahal di antara kedua negara. Hal ini juga menjadi kendala bagi masuknya komoditas agrikultur Indonesia ke Jepang¹¹ dan membuat komoditas agrikultur Indonesia yang masuk ke Jepang memiliki daya saingnya lebih rendah dibandingkan komoditas lokal Jepang. Oleh sebab itu, adanya eliminasi hambatan-hambatan perdagangan di sektor agrikultur dalam

⁹ Prajogo U. Hadi dan Julia F. Sinuraya, *Kinerja dan Strategi Penguatan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia*, diakses melalui http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/memperkuat_dayasaing_produk_pe/BAB-II-3.pdf, pada 4 Desember 2016

¹⁰ Dinas Perindustrian dan Perdagangan, *Memaksimalkan Kualitas Ekspor Komoditi Pertanian*, diakses melalui <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1543>, pada 30 November 2016

¹¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Mengenal Pasar Jepang*, diakses melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/pejuang-pasar-jepang-id0-1354945395.pdf>, pada 1 Desember 2016

kerangka I-J EPA diharapkan dapat meningkatkan ekspor komoditas agrikultur Indonesia ke Jepang.

Kedua, untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan ini menyangkut kemampuan produksi komoditas agrikultur Indonesia yang berguna sebagai bahan pangan untuk memenuhi konsumsi penduduk Indonesia sendiri. Bertambahnya populasi di Indonesia tidak sebanding dengan pertambahan produksi komoditas agrikultur utama untuk pangan, seperti beras dan jagung. Hal ini membuat Indonesia tergantung pada impor dari luar negeri komoditas tersebut untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

Masalah ketahanan pangan ini terkait dengan luas lahan agrikultur, infrastruktur yang memadai, seperti irigasi, termasuk bendungan dan sumber air lainnya, teknologi, kualitas sumber daya manusia, distribusi yang lebih mudah dan merata, serta dana bagi riset dan pengembangan di sektor agrikultur.¹² Infrastruktur yang baik diiringi dengan teknologi untuk menghasilkan komoditas agrikultur yang efektif dan efisien dilengkapi dengan pengetahuan para petani tentang penggunaan teknologi tersebut serta manajemen pengelolaan komoditas agrikultur yang baik dapat meningkatkan produktivitas komoditas agrikultur sehingga ketahanan pangan dapat tercapai.

Dengan latar belakang inilah, Indonesia melihat I-J EPA sebagai sebuah peluang yang positif. Perdagangan bebas, kemudian, diwujudkan

¹² Mewa Ariani, *Upaya Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Mendukung Ketahanan Pangan*, diakses melalui <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/swasembada/BAB-IV-2.pdf>, pada 4 Desember 2016

antara Indonesia dengan Jepang dalam kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* atau yang disingkat dengan I-J EPA. Indonesia berharap agar melalui I-J EPA hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang, terutama ekspor Indonesia ke Jepang dapat ditingkatkan.¹³ Hubungan perdagangan yang sudah baik dengan Jepang diharapkan akan tetap baik dan terus memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam karya tulis ini penulis akan menganalisis apakah implementasi I-J EPA benar akan memberikan hasil yang positif bagi sektor agrikultur Indonesia ataukah merugikan Indonesia sendiri.

1.2.1 Pembatasan Masalah

I-J EPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral yang dilakukan antara dua negara, yaitu Indonesia dengan Jepang. Dalam skema kerjasama ekonomi ini telah disepakati sebelas sektor yang tercakup dalam perjanjian. Oleh sebab itu, agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah maka penulis memusatkan fokus penelitian ini pada dampak dari implementasi perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia dengan Jepang pada sektor agrikultur di Indonesia. Penulis membatasi periode waktu dimulai tahun 2008, sebab I-J EPA sendiri baru diberlakukan di tahun ini, dan sampai tahun 2013 sebab mulai tahun ini I-J EPA dijadwalkan untuk dievaluasi sesuai dengan artikel 151 pada teks perjanjian I-J EPA.¹⁴

¹³ Akbar Nikmatullah Dachlan, *op.cit.*, hal. 8

¹⁴ Dini Haryanti, "Jepang Sengaja Tunda Evaluasi Kerjasama IJEPa, Impor RI Terus Menanjak", *industri*, 7 Oktober 2014, diakses melalui <http://industri.bisnis.com/read/20141007/257/263011/jepang-sengaja-tunda-evaluasi-kerja-sama-ijepa-impor-ri-terus-menanjak>, pada 6 Juni 2016

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka timbul pertanyaan penelitian, *Bagaimana Dampak Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (I-J EPA) terhadap Sektor Agrikultur Indonesia tahun 2008-2013?*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dampak yang diperoleh dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang dalam kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (I-J EPA)* terhadap sektor agrikultur Indonesia tahun 2008-2013.

Di samping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan topik ini dan yang pekerjaannya terkait dengan topik ini. Selain itu, penelitian ini berguna untuk membuka jalan bagi pengamat untuk dapat meneliti dan mengamati lebih jauh langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari dampak negatif yang sama terulang kembali dan untuk mempertahankan dampak positif yang telah ada.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Teoretis

Dalam studi hubungan internasional, yang dimaksud dengan hubungan internasional ialah hubungan-hubungan dan interaksi-interaksi

antara negara-negara, termasuk aktivitas-aktivitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah, organisasi-organisasi internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan perusahaan-perusahaan multinasional.¹⁵ Dari definisi di atas didapat bahwa aktor dalam hubungan internasional tidak hanya terdiri dari negara, tetapi juga aktor non-negara, seperti organisasi non-pemerintah dan perusahaan internasional.

Dalam penulisan ini, negara akan menjadi aktor hubungan internasional yang akan dibahas. Negara sendiri berarti suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹⁶

Dalam ilmu hubungan internasional, negara didefinisikan sebagai sebuah wilayah dengan batas-batas yang pasti, mempunyai populasi yang menjadi rakyat, dan diatur oleh pemerintah dengan kekuasaan tertinggi yang memiliki yurisdiksi. Negara merupakan entitas yang merdeka satu sama lain sebab negara memiliki kedaulatan sehingga disebut sebagai negara berdaulat.¹⁷

Masing-masing negara memiliki nilai-nilai dasar yang ingin dicapai, yaitu keamanan, kebebasan, keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan.¹⁸ Dalam hal kesejahteraan, pemerintah sebuah negara diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Dari penjelasan di atas dapat

¹⁵ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hal. 3

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1971), hal. 9

¹⁷ Robert Jackson and Georg Sorensen, *op. cit.*, hal. 4-5

¹⁸ *Ibid.*, hal 5

dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan sebuah negara yang perlu dicapai dan kesejahteraan tersebut dapat dicapai melalui kerjasama ekonomi antar-negara.

Di dalam studi hubungan internasional, Keohane mengartikan kerjasama sebagai sesuatu yang terjadi ketika aktor-aktor dalam hubungan internasional saling menyesuaikan perilaku sesuai dengan harapan satu sama lain melalui proses koordinasi kebijakan. Dalam sebuah kerjasama ini ada tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai oleh aktor-aktor yang terlibat dan diharapkan bahwa kerjasama ini akan membawa keuntungan yang mutual.¹⁹

Bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Jepang merupakan kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi sendiri merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang disepakati dengan cara membentuk serangkaian peraturan. Peraturan ini disepakati guna menciptakan kondisi-kondisi yang ideal sehingga interaksi negara-negara tersebut dalam perdagangan dan integrasi finansial dapat dicapai dengan lebih mudah. Hal ini dicapai melalui penerapan tindakan-tindakan maupun kebijakan dan peraturan yang bertujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi, baik dalam jangka waktu menengah maupun panjang.²⁰

Kerjasama ekonomi bisa terlaksana dalam bentuk perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. I-J EPA merupakan bentuk perjanjian kerjasama ekonomi bilateral antara dua negara, Indonesia dan Jepang. Menurut Goldstein dan Pevehouse, perjanjian kerjasama ekonomi

¹⁹ Helen Milner, "International Theories of Cooperation among Nations: Strengths and Weaknesses", *World Politics* 44, no. 3, April 1992, hal. 467-468

²⁰ Enrique O'Farill, et. al., *Economic Cooperation*, the Chilena Agency for International Cooperation, Desember 1999, diakses melalui http://www.agci.cl/images/centro_documentacion/documento_de_trabajo_cooperacion_economica_ingles.pdf, pada 31 Maret 2016

bilateral sendiri berarti perjanjian antara dua negara yang mencakup perdagangan dengan usaha-usaha menurunkan dan menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan di antara dua negara yang bersifat resiprokal.²¹ Perjanjian kerjasama ini difungsikan sebagai sebuah peraturan untuk menegakan kontrak-kontrak dalam perjanjian tersebut, mencegah adanya monopoli salah satu negara, dan mencegah tindakan proteksionisme.²²

Kerangka perjanjian antara dua negara dapat diwujudkan untuk mengatur kerjasama ekonomi di antara negara-negara tersebut, misalnya seperti pajak yang dikenakan terhadap produk dari masing-masing negara juga arus gerak barang dan jasa keluar maupun masuk sebuah negara.

Perjanjian kerjasama ekonomi ini muncul sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Konsep kepentingan nasional merupakan nilai-nilai inti yang ada pada masyarakat sebuah negara. Hal ini dikemukakan oleh Padelford dan Lincoln. Kepentingan nasional meliputi kesejahteraan masyarakat, keamanan politik negara, pandangan hidup sebuah negara, integritas teritorial, dan kelestarian negara.²³ Dari sudut pandang ekonomi, kepentingan nasional sebuah negara diwujudkannyatakan dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ini negara perlu memiliki kekuatan ekonomi yang baik sehingga negara memiliki aset dan biaya yang cukup

²¹ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, "International Relations", (New York: Pearson Longman, 2006), hal. 327

²² Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, *ibid.*, hal. 320

²³ P. Chandra dan Rajni Singh, *Theories of International Relations*, (New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD, 2004), hal. 100

untuk memberikan fasilitas, sarana maupun prasarana guna mensejahterakan masyarakat.

Dalam menciptakan kerjasama ekonomi antar-negara, negara perlu memiliki hubungan bilateral yang baik. Hubungan bilateral yang baik ini memungkinkan negara untuk menciptakan sebuah kerjasama ekonomi.

Di dalam studi Hubungan Internasional, diakui pula adanya keterkaitan antara politik dan ekonomi, yang dibahas dalam ekonomi politik internasional. Menurut Ezra Vogel, ekonomi politik internasional adalah sebuah bidang studi yang menganalisis permasalahan dan pertanyaan yang muncul dari keberadaan dan interaksi dinamis antara negara dengan pasar di dunia modern.²⁴

Terdapat tiga pandangan dalam studi ekonomi politik internasional, yaitu merkantilis, marxis, dan liberalis. Para penganut liberalis percaya bahwa masuknya negara ke dalam ekonomi internasional merupakan faktor yang positif bagi pembangunan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan juga dipercaya sebagai mesin pertumbuhan negara.²⁵ Hal ini pulalah yang menjadi latar belakang negara-negara ikut serta dalam sebuah kerjasama ekonomi dengan negara lain.

Kerjasama ekonomi antara dua negara tidak terlepas dari ekspor-impor. Ekspor merupakan kegiatan mengirim barang dan/atau jasa ke luar

²⁴ David N. Balaam dan Michael Veseth, "Perspective on International Political Economy", *Readings in International Political Economy*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1996), hal. 1

²⁵ Robert Gilpin, "The Nature of Political Economy", *International Political Economy: State-Market Relations in a Changing Global Order*, 2nd ed oleh C. Roe Goddard, Patrick Cronin dan Kishore C. Dash, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2003), hal. 13

negeri atau pasar internasional untuk dijual.²⁶ Kegiatan ekspor ini menjadi salah satu cara bagi negara untuk meningkatkan pendapat nasionalnya. Sedangkan, impor merupakan kegiatan membeli barang dan/atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri baik produk mentah yang diolah kemudian dijual kembali maupun produk jadi yang dapat dijual langsung.²⁷ Dalam kegiatan impor ini negara menggunakan kembali pendapatan nasionalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ekspor impor atau perdagangan internasional dipandang sebagai kegiatan yang akan saling menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh karena suatu barang dapat diperoleh sebuah negara dengan harga yang lebih murah di negara lain daripada diproduksi di negara sendiri. Sedangkan, barang dan/atau jasa yang dapat diproduksi dalam negeri lebih murah dan tersedia dalam jumlah banyak dapat diekspor. Hal ini disebut dengan keuntungan komparatif.²⁸

Perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan Jepang dapat dikategorikan sebagai perdagangan bebas sebab terdapat tujuan-tujuan di antara kedua negara untuk menurunkan hambatan perdagangan di antara mereka. Liberalisasi perdagangan didefinisikan oleh *International Labor Organization* (ILO) sebagai pergerakan atau pergeseran menuju

²⁶ US Economy, *Export: Definition, Examples, Effect on Economy*, diakses melalui <http://useconomy.about.com/od/glossary/g/Exports.htm>, pada 31 Maret 2016

²⁷ US Economy, *Import: Definition, Examples, Effect on Economy*, diakses melalui <http://useconomy.about.com/od/glossary/g/Imports.htm>, pada 31 Maret 2016

²⁸ David N. Balaam, *International Political Economy 6th edition*, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2014), hal. 18

perdagangan yang lebih bebas dengan pengurangan tarif dan hambatan-hambatan lainnya sebagai pendorong globalisasi.²⁹

Tidak hanya penurunan tarif dan berbagai hambatan perdagangan, tetapi I-J EPA juga mendorong adanya investasi. Investasi dari luar negeri disebut dengan investasi asing yang merupakan bentuk transfer aset-aset, baik yang bergerak maupun tidak, dari luar negeri, dalam hal ini Jepang ke Indonesia, untuk digunakan agar menghasilkan kekayaan bagi pemilik aset tersebut.³⁰

Sedangkan, dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.³¹

Peraturan tentang penanaman modal ini berbeda-beda untuk setiap negara mengenai daftar usaha yang dibolehkan untuk mengandung modal asing, persentase yang diizinkan untuk modal asing tersebut, dan sebagainya.

Selain menghapus hambatan perdagangan dan investasi, kerjasama ekonomi ini juga dilengkapi dengan kebebasan dalam pergerakan manusia,

²⁹ International Labour Office Governing Body: Working Party on the Social Dimension of Globalization, *Trade Liberalization and Employment*, International Labor Organization, hal. 1, diakses melalui <http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/sdg-2.pdf>, pada 8 Maret 2016

³⁰ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment 3rd edition*, (New York: Cambridge University Press, 2010), hal. 8

³¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, diakses melalui <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.htm>, pada 4 November 2016

perjanjian dalam hal teknologi, pajak, penyelesaian sengketa, investasi, dan sebagainya.

Penulisan ini berfokus pada sektor agrikultur. Hal ini dikarenakan sebab di Indonesia, sektor agrikultur masih memegang peranan yang penting. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor agrikultur ini. Sampai tahun 2012 tenaga kerja di sektor pertanian menyerap 33,89% dari total tenaga kerja di Indonesia.³²

Agrikultur secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *agricultura*, *ager* berarti tanah dan *cultura* berarti kultivasi. Sedangkan menurut *Agricultur Act 1947*, agrikultur berarti pekerjaan yang memanfaatkan elemen-elemen alam untuk memproduksi tumbuh-tumbuhan maupun hewan dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia, termasuk hortikultura, penumbuhan buah dan biji, pertanian, dan peternakan.³³

Sebuah kerjasama ekonomi akan memberikan dampak bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Hal inilah yang ingin penulis telaah dalam implementasi I-J EPA terhadap sektor agrikultur Indonesia. Untuk memahami tentang dampak itu sendiri, perlu dipahami konsep *output*, *outcome*, dan *impact* yang merupakan jenis-jenis hasil dalam pendekatan *Results-Based Management (RBM)*.

Pendekatan RBM dikemukakan oleh *Canada International Development Agency (CIDA)*. Dalam pendekatan ini, *output* merupakan barang atau jasa yang dihasilkan langsung dari aktivitas organisasi, proyek,

³²Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, “Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2013”, Pusat *Data dan Sistem Informasi Pertanian*, diakses melalui <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/statistika-191-ketenagakerjaan-sektor-pertanian-tahun-2013.html>, pada 6 September 2016

³³ Chandrasekaran, Annadurai, dan Somasundaram, *A Textbook of Agronomy*, (New Delhi: New Age International (P) Limited Publishers, 2010), hal. 1-2

program, atau kebijakan, seperti teknologi baru, penyelesaian pelatihan, dan penyelesaian penelitian. Kemudian, *outcome* terbagi menjadi dua, yaitu *immediate outcome* dan *intermediate outcome*. *Immediate outcome* merupakan perubahan-perubahan yang secara langsung dipengaruhi oleh output, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran. Sedangkan, *intermediate outcome* merupakan perubahan-perubahan yang secara logika diharapkan muncul setelah *immediate outcome* tercapai, seperti peningkatan penggunaan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan. Lebih lanjut lagi, *impact* atau yang didefinisikan CIDA sebagai *ultimate outcome* merupakan level perubahan tertinggi ketika *intermediate outcome* sudah, setidaknya, sekali tercapai, seperti peningkatan produktivitas dan produksi. *Impact* ini dilihat sebagai tahap perubahan berkelanjutan.³⁴

Selanjutnya, daya saing menurut B. Scott dan D. Lodge merupakan kemampuan negara untuk menciptakan, membuat, mendistribusikan, dan menawarkan produk dalam perdagangan internasional diiringi dengan peningkatan keuntungan secara simultan dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam negaranya.³⁵ Sedangkan, dikutip dari Balai Penelitian dan Perkembangan Pertanian Indonesia, daya saing berarti kemampuan suatu perusahaan, sub-sektor atau negara untuk menawarkan barang dan jasa yang memenuhi standar kualitas pasar domestik dan pasar dunia pada harga yang

³⁴ Berhanu G, Abraham G, dan Rebeka A, *Results-based Monitoring and Evaluation for Organizations Working in Agricultural Development: a Guide for Practitioners*, (Addis Ababa: International Livestock Research Institute, 2010), hal. 4-5

³⁵ Alexander Chursin dan Yuri Marakov, "Formation of the Theory of Competitiveness Management", *Management of Competitiveness: Theory and Practice*, (Zug: Springer International Publishing, 2015), hal. 7

bersaing dan memberikan pendapatan yang memadai pada sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya.³⁶ Dari kedua deifinisi di atas berarti daya saing diartikan sebagai kemampuan negara untuk memproduksi produk dalam perdagangan internasional yang dapat memberi keuntungan atau pendapatan. Dalam penulisan ini berarti bagaimana implementasi I-J EPA dapat membantu Indonesia dalam menghasilkan komoditas agrikultur Indonesia yang menguntungkan.

1.4.2 Kajian Literatur

Bentuk kerjasama EPA yang diinisiasi oleh Jepang juga dilakukan dengan Filipina. Manfaat dari diberlakukannya EPA ini turut dirasakan Filipina. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan volume ekspor dari Filipina ke Jepang dari tahun 2007 – 2011. Namun, dalam hal investasi, perbandingan arus investasi Jepang ke Filipina dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya terbilang masih kecil, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Demikian pula halnya dengan pergerakan manusia lintas batas kedua negara yang masih terbatas. Hal-hal inilah yang masih menjadi tantangan tersendiri bagi Filipina dalam menghadapi EPA dengan Jepang. Hasil ini dikemukakan oleh Erlinda M. Medalla dan Veredigna M. Ledda dalam *Philippine – Japan Economic Partnership Agreement: An Initial Ex-post Review*.

³⁶ Prajogo U. Hadi dan Julia F. Sinuraya, *Op.cit*

Secara lebih spesifik, implementasi EPA ini juga dilakukan antara Indonesia dengan Jepang. Implementasi IJ EPA ini ternyata telah cukup banyak dianalisis dalam berbagai sudut pandang.

Sigit Setiawan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) melakukan *Analisis Dampak I-J EPA terhadap Indonesia dan Jepang*. Penelitian ini merupakan prediksi akan dampak dari implementasi I-J EPA. Dampak ini dilihat dari kontribusi ekspor terhadap pendapatan nasional dan peningkatan nilai ekspor. Indonesia mendapatkan keuntungan dari implementasi I-J EPA melalui peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang yang memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Peningkatan nilai ekspor mencapai 5,23%. Sedangkan, Jepang mendapatkan keuntungan yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia dengan implementasi I-J EPA. Analisis ini dilakukan dengan model ARIMA melalui peramalan dan simulasi.

Aziza R. Salam, Sefiani Rayadiani, dan Immanuel Lingga dari Kementerian Perdagangan RI melakukan *Analisis I-J EPA dan Implikasinya terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia-Jepang*. Implikasi ini dilihat dari implementasi formulir Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai sebuah tanda bahwa barang yang diperdagangkan telah memiliki sertifikat. Dari hasil yang diperoleh, manfaat yang diterima Indonesia dari implementasi formulir tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian perdagangan lainnya dan lonjakan beberapa produk impor.

Selanjutnya, Rizky Wendy Firdaus menganalisis tentang *Implementasi I-J EPA terhadap Defisitnya Neraca Perdagangan Non-migas Indonesia tahun 2008-2012*. Neraca perdagangan non-migas Indonesia mengalami defisit dilihat dari tahun 2008-2010. Padahal, sebelum implementasi I-J EPA, perdagangan Indonesia mengalami surplus. Menurut Firdaus, hal ini berkaitan dengan penurunan hambatan tarif secara bertahap antara kedua belah pihak. Masyarakat Jepang lebih memiliki nasionalisme yang tinggi dibandingkan rakyat Indonesia di mana produk domestik adalah nomor satu. Sedangkan, masyarakat Indonesia cenderung memilih produk yang lebih murah dengan kurang mempedulikan negara asal produksinya.

Dalam bidang agrikultur atau yang dikenal dengan pertanian sudah ada penelitian tentang *Dukungan Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia pada Sektor Pertanian melalui Kerjasama Economic Partnership Agreement tahun 2006 – 2010* yang dibuat oleh Fitri Kusuma Wardhani. Dukungan Jepang bagi sektor pertanian Indonesia berubah dari yang semula dalam bentuk ODA menjadi bantuan hibah bagi para petani pra-sejahtera (*Grant Assistance for Underprivileged Farmers*).

Dari kajian literatur di atas belum ada yang berfokus pada dampak implementasi I-J EPA terhadap sektor agrikultur Indonesia di tahun 2008-2013. Kajian literatur di atas mayoritas mengkaji dampak dari I-J EPA secara umum terhadap Indonesia, terutama dilihat dari perdagangan. Kajian literatur yang berkaitan dengan pertanian di atas cenderung membahas tentang bantuan dan hibah yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, bukan

tentang dampaknya terhadap Indonesia. Dengan demikian, penulisan ini berbeda dengan penulisan-penulisan I-J EPA yang telah ada sebelumnya.

1.5 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu bentuk metode penelitian yang berusaha untuk mencari tahu dan memahami pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita yang dianggap sebagai masalah oleh individu atau kelompok, analisis data biasanya dilakukan dengan menarik hal-hal yang khusus menjadi umum sehingga peneliti melakukan interpretasi terhadap data.³⁷

Dalam melakukan penelitian mengenai topik ini, penulis juga akan menggunakan metode penelitian deksriptif yang berangkat dari pertanyaan dasar *bagaimana*. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel-variabel lain dengan suatu masalah yang terjadi.³⁸

Untuk dapat melakukan analisis terhadap masalah dalam penulisan ini sehingga dapat menemukan jawabannya, diperlukan adanya data-data yang menunjang. John W. Creswell mendefinisikan dua teknik pengumpulan data yang dilakukan para peneliti kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data di tempat penelitian dengan melakukan komunikasi dan wawancara dengan kelompok atau seseorang; atau peneliti menjadi instrumen kunci di mana peneliti mengumpulkan data dengan melakukan

³⁷ John W. Creswell, *Research Design 4th edition: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage publications, 2014), hal. 4

³⁸ W. Gulö, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal 19

observasi dan analisis dokumen.³⁹ Untuk itu, penulis akan memperoleh data dengan dua strategi, yaitu:

- a. Melakukan wawancara dengan Bapak Fahmi Jamaludin, Wakil Direktur Direktorat Perdagangan, Industri, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang terlibat pada waktu awal perundingan I-J EPA.
- b. Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, penulis juga mengikutsertakan data penunjang yang diperoleh dari media cetak, seperti buku dan jurnal, maupun elektronik, seperti dari internet.

Kemudian, seluruh data yang dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan topik penelitian dan menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas pernyataan penelitian yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang komprehensif maka penelitian ini terdiri dari lima bab yang berkesinambungan. Bab I akan membahas tentang latar belakang masalah di mana konteks masalah atau isu itu muncul, identifikasi masalah berdasarkan data-data yang

³⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 3rd ed, (Los Angeles: Sage Publications, 2013), hal. 45

kemudian akan dibatasi dalam kerangka tempat serta waktu dan diakhir dengan pertanyaan penelitian. Dalam bab ini juga akan akan dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian ini beserta metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian, akan dibahas pula kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam analisis untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Selanjutnya, dalam bab II akan dibahas tentang *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (I-J EPA) secara keseluruhan. Untuk membahas hal ini perlu diketahui pula kronologi terbentuknya I-J EPA dari masa perundingan hingga penandatanganan perjanjian dan implementasi, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam I-J EPA, sektor-sektor apa saja yang tercakup di dalam I-J EPA itu sendiri, sampai peluang dan tantangan Indonesia dalam menghadapi I-J EPA.

Dalam bab berikutnya akan dibahas mengenai industri agrikultur Indonesia yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Untuk mengetahui dampak I-J EPA terhadap sektor agrikultur, kita perlu mengetahui pengertian agrikultur di Indonesia maupun dalam kerangka I-J EPA, kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di sektor agrikultur, juga profil umum sektor agrikultur Indonesia. Profil umum ini mencakup luas lahan pertanian Indonesia, komoditas agrikultur, dan lain-lain.

Bab IV akan membahas tentang implementasi I-J EPA di sektor agrikultur dan dampak dari implementasi I-J EPA tersebut terhadap sektor agrikultur Indonesia. Dampak ini dilihat dari nilai ekspor dan impor

komoditas agrikultur antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama Indonesia dengan Jepang di sektor agrikultur, serta perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi Jepang di sektor agrikultur Indonesia. Setelah semua data dikumpulkan, dalam bab ini akan terdapat analisis dampak I-J EPA terhadap sektor agrikultur Indonesia dilihat dari nilai ekspor-impor, investasi, dan kerjasama di sektor agrikultur.

Pada bab terakhir akan ditemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang merupakan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Di samping itu, dalam bab ini juga akan dikemukakan saran yang penulis pikir perlu untuk dilakukan berkaitan dengan implementasi IJEPA di Indonesia, terutama dalam sektor agrikultur.